

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020–2024

Mia Aulia Nisa^{1*}, Lintang Venusita²

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*E-mail: mia.22069@mhs.unesa.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-06-2026

Revision: 15-06-2026

Published: 20-07-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.582

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun, masih terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel penelitian mencakup 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024 sehingga menghasilkan 190 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas ekonomi daerah merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak, sedangkan manfaat belanja modal cenderung bersifat jangka panjang dan belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada penguatan aktivitas ekonomi dan optimalisasi kapasitas fiskal daerah.

Kata Kunci: PDRB, Belanja Modal, Penerimaan Pajak Daerah, Data Panel, Kapasitas Fiskal.

A B S T R A C T

This study aims to examine the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Capital Expenditure on Local Tax Revenue in regencies and municipalities of East Java Province during the 2020–2024 period. Local tax revenue represents a major source of Regional Original Revenue and plays a crucial role in strengthening regional fiscal independence. However, a gap remains between regional economic potential and actual tax revenue realization. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from Statistics Indonesia and Regional Government Financial Reports. The sample consists of 38 regencies and municipalities observed over

Acknowledgment

five years, resulting in 190 panel data observations. Data were analyzed using panel regression with the Fixed Effect Model (FEM), selected based on the Chow Test and Hausman Test results. The findings reveal that GRDP has a positive and significant effect on local tax revenue. In contrast, Capital Expenditure does not significantly affect local tax revenue. These results indicate that regional economic capacity is the primary determinant of local governments' ability to generate tax revenue, while the benefits of capital expenditure tend to materialize in the long term and do not directly increase tax revenue. This study provides practical implications for local governments in formulating policies aimed at strengthening economic activities and optimizing regional fiscal capacity.

Keywords: *GRDP, Capital Expenditure, Local Tax Revenue, Panel Data, Fiscal Capacity*

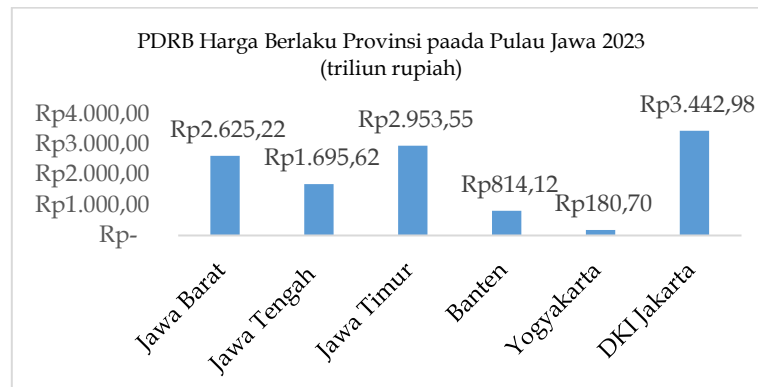
©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Optimalisasi penerimaan pajak daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi wilayah secara mandiri, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah (Asadanie & Venusita, 2020). Dalam perspektif desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat melalui optimalisasi penerimaan daerah, terutama yang bersumber dari pajak daerah (Musgrave, 1959; Oates, 1972). Namun, optimalisasi penerimaan pajak daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Yossinomita (2025) menunjukkan bahwa sekitar 70% pemerintah daerah hanya mampu menghasilkan PAD kurang dari 40% terhadap total belanja daerah, yang mengindikasikan masih terbatasnya kemampuan fiskal daerah dan tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa potensi pajak daerah belum dioptimalkan secara efektif dan konsisten.

Fenomena ini juga terlihat pada tingkat nasional, di mana kontribusi pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai wilayah masih relatif rendah meskipun perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif (Yossinomita, 2025). Ketidaksesuaian antara kapasitas ekonomi daerah dan realisasi penerimaan pajak menunjukkan bahwa potensi fiskal belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menggali basis pajak yang tersedia (Prest, 1962; Osoro, 1995; Bahl & Bird, 2008). Situasi ini semakin penting dalam konteks pascapandemi ketika daerah menghadapi tekanan fiskal akibat perlambatan ekonomi, perubahan struktur industri, dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan publik (Asy'ari, 2023). Oleh karena itu, penelitian mengenai

faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah diperlukan sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan kapasitas penerimaan daerah secara optimal.

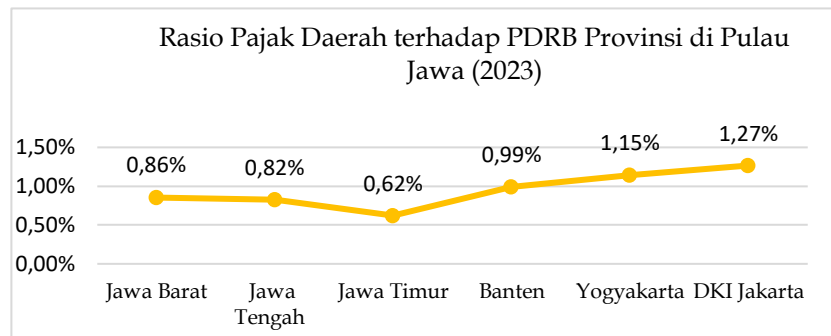


Gambar 1. PDRB Atas Harga Berlaku

Sumber: Data diolah dari BPS, 2023

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu kontributor utama perekonomian nasional sehingga relevan dijadikan objek penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2023, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.953,54 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% (Badan Pusat Statistik, 2023a). Besarnya aktivitas ekonomi, jumlah penduduk, dan perkembangan berbagai sektor ekonomi menunjukkan potensi fiskal yang besar untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah (Bahl & Bird, 2008). Dalam perspektif kapasitas fiskal, tingginya aktivitas ekonomi mencerminkan semakin luasnya basis pajak yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, sehingga PDRB sering digunakan sebagai indikator kapasitas ekonomi dan potensi fiskal suatu daerah (Bahl & Bird, 2008; Todaro & Smith, 2015).

Namun, data empiris menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas fiskal dan realisasi penerimaan pajak daerah di Jawa Timur. Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi mencapai Rp22,3 triliun dengan kontribusi pajak daerah sebesar 82,28% (Badan Pusat Statistik, 2023b). Meskipun kontribusi pajak daerah tergolong dominan, rasio pajak daerah terhadap PDRB masih relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa potensi ekonomi yang besar belum sepenuhnya tercermin dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.



Gambar 2. Rasio Pajak terhadap PDRB

Sumber: Data diolah dari BPS, 2023

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 rasio pajak daerah Jawa Timur terhadap PDRB hanya mencapai sekitar 0,62%, yang merupakan rasio terendah di Pulau Jawa (Badan Pusat Statistik, 2023b; Yossinomita, 2025). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara besarnya potensi ekonomi Jawa Timur dan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak yang proporsional, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah.

Selain kapasitas ekonomi yang tercermin melalui PDRB, belanja modal juga diduga memengaruhi penerimaan pajak daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah dalam jangka panjang (Musgrave, 1959). Melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, sarana transportasi, dan aset produktif lainnya, belanja modal dapat mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas peluang usaha, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan konsumsi masyarakat. Secara teoritis, peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik dapat memperkuat aktivitas ekonomi yang pada akhirnya memperluas basis pajak daerah (Bahl & Bird, 2008). Oleh karena itu, selain berperan dalam pembangunan daerah, belanja modal juga berpotensi memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan penerimaan pajak daerah.

Secara teoretis, penelitian ini didukung oleh konsep ekonomi regional yang menempatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator aktivitas ekonomi suatu wilayah. Tingginya PDRB mencerminkan peningkatan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi yang berpotensi meningkatkan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak (Mankiw, 2019). Sementara itu, hubungan antara belanja modal dan penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan melalui peran investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset publik yang mampu mendorong aktivitas ekonomi serta memperluas basis penerimaan pajak daerah (Musgrave, 1959). Dengan demikian, PDRB

dan belanja modal merupakan faktor yang secara konseptual berpotensi memengaruhi penerimaan pajak daerah.

Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam. Anggraeni *et al.*, (2021) menemukan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, Nicola & Saleh (2023) menunjukkan bahwa PDRB dan belanja modal sama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Temuan Rosyadi (2024) serta Sania *et al.*, (2018) juga mengindikasikan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kondisi ekonomi daerah, kebijakan belanja pemerintah, dan penerimaan pajak daerah masih menghasilkan temuan yang inkonsisten. Selain itu, karakteristik demografis seperti jumlah penduduk juga berpotensi memengaruhi penerimaan pajak melalui perluasan basis pajak (Bird & Zolt, 2005). Inkonsistensi hasil penelitian serta keterbatasan cakupan wilayah pada penelitian terdahulu menunjukkan adanya *research gap*. Penelitian yang menguji pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan terbaru masih relatif terbatas.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada faktor ekonomi dan fiskal, sementara karakteristik demografis yang berpotensi memengaruhi basis penerimaan pajak daerah masih relatif jarang dikendalikan dalam model penelitian. Padahal, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat memengaruhi aktivitas ekonomi serta kapasitas fiskal daerah melalui perluasan basis pajak (Yossinomita, 2025). Jika kondisi ini tidak diperhatikan, upaya mencapai kemandirian fiskal daerah dapat terhambat dan berdampak pada pembangunan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman empiris yang lebih komprehensif.

Berdasarkan fenomena, landasan teori, dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Modal terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk meningkatkan akurasi estimasi, penelitian juga memasukkan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai variabel kontrol.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antarvariabel secara sistematis, objektif, dan terukur berdasarkan data numerik yang diolah menggunakan teknik statistik (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini dipilih karena memung-

kinkan pengujian hipotesis serta pengukuran pengaruh variabel secara empiris.

Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan, publikasi statistik, dan dokumen resmi pemerintah karena memungkinkan analisis yang objektif dan terukur mengenai hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal, dan penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024 (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan berbentuk data panel, yaitu kombinasi data runtut waktu (*time series*) tahun 2020–2024 dan data lintas wilayah (*cross section*) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga mampu menangkap variasi data berdasarkan dimensi waktu dan wilayah secara simultan (Baltagi, 2008).

Data PDRB, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan data belanja modal dan penerimaan pajak daerah bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penggunaan sumber resmi pemerintah menjamin keandalan data karena telah melalui proses pencatatan dan verifikasi (Nazir, 2014), serta memenuhi aspek validitas, reliabilitas, dan akuntabilitas metodologis dalam penelitian kuantitatif (Creswell, 2014).

Populasi penelitian meliputi seluruh data PDRB, belanja modal, penerimaan pajak daerah, serta variabel kontrol berupa jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Cakupan data tersebut memungkinkan analisis hubungan antara kondisi ekonomi, fiskal, dan demografis daerah secara komprehensif melalui pendekatan data panel (Gujarati & Porter, 2009).

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria kelengkapan data seluruh variabel selama periode pengamatan. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel mencakup seluruh 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota selama tahun 2020–2024. Seluruh observasi dianalisis menggunakan model data panel untuk menguji pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah dengan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan TPAK sebagai variabel kontrol.

Pemilihan model data panel dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Pooled Least Squares* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM), sedangkan Uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan *Random Effect Model* (REM). Model dipilih berdasarkan tingkat signifikansi pengujian sesuai prosedur regresi data panel yang direkomendasikan oleh Wibowo (2025).

Setelah model terbaik ditetapkan, dilakukan pengujian asumsi regresi panel yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji t. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Baltagi, 2008; Ghozali, 2018). Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, sedangkan uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean.	Median	Std. Dev.	Min	Maks
X1	46441.96	23645.49	72718.40	4722.55	485448.89
X2	375.78	274.47	347.71	69.35	2025.42
Y	289.17	111.18	657.86	27.48	4784.14
K1	543.70	544.46	336.03	65.50	1446.31
K2	1988.97	911.00	2260.83	295.00	8698.00
K3	71.82	71.65	3.69	63.08	86.62

Sumber: Data Peneliti, 2026

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki tingkat variasi yang beragam antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel Pajak Daerah memiliki rata-rata sebesar 289,17 dengan rentang nilai antara 27,48 hingga 4.784,14, yang mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan fiskal daerah dalam menghimpun penerimaan pajak. Variabel PDRB memiliki rata-rata sebesar 46.441,96 dengan rentang nilai 4.722,55 hingga 485.448,89, menunjukkan adanya kesenjangan aktivitas ekonomi yang cukup besar antarwilayah. Sementara itu, Belanja Modal memiliki rata-rata 375,78 dengan nilai minimum 69,35 dan maksimum 2.025,42, yang mencerminkan perbedaan kapasitas pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur.

Pada variabel kontrol, Jumlah Penduduk memiliki rata-rata 543,70 dengan rentang nilai 65,51–1.446,31, sedangkan Kepadatan Penduduk menunjukkan variasi yang tinggi dengan nilai antara 295,00 hingga 8.698,00. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki rata-rata 71,82 dengan penyebaran data yang relatif rendah, yang mengindikasikan kondisi partisipasi angkatan kerja yang cenderung stabil antarwilayah. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya heterogenitas data, terutama pada variabel ekonomi dan fiskal, sehingga mendukung penggunaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini.

Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Tabel 2. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	78.670266	(37,147)	0.0000
Cross-section Chi-square	576.653485	37	0.0000

Sumber: Data Peneliti, 2026

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas *cross-section* Chi-square sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) dinyatakan lebih sesuai dibandingkan *Common Effect Model* (CEM) dalam menjelaskan variasi data penelitian.

b. Uji Hausman

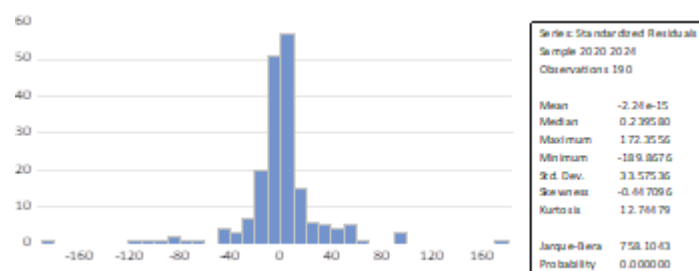
Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	73.151268	5	0.0000

Sumber: Data Peneliti, 2026

Hasil Uji Hausman pada Tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih sebagai model yang paling sesuai. Hasil tersebut mengindikasikan adanya perbedaan koefisien yang sistematis antara FEM dan *Random Effect Model* (REM), serta menunjukkan adanya korelasi antara efek individual daerah dan variabel independen. Oleh karena itu, FEM digunakan untuk mengestimasi pengaruh PDRB dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah pada 190 observasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024.

Uji Normalitas



Gambar 3. Uji Normalitas

Sumber: Data diolah, 2026

Meskipun hasil uji Jarque-Bera menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, asumsi normalitas tetap dianggap terpenuhi berdasarkan Teorema Limit Pusat (*Central Limit Theorem*). Teorema ini menyatakan bahwa pada ukuran sampel yang cukup besar, distribusi rata-rata sampel akan cenderung mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, dengan jumlah observasi yang melebihi 30, residual penelitian dapat dianggap memenuhi asumsi normalitas sehingga analisis regresi data panel dapat dilanjutkan tanpa adanya pelanggaran asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	K1	K2	K3
X1	1.000000	0.673164	0.632440	0.407696	-0.214192
X2	0.673164	1.000000	0.589042	0.093608	-0.049799
K1	0.632440	0.589042	1.000000	-0.185664	-0.131930
K2	0.407696	0.093608	-0.185664	1.000000	-0.358410
K3	-0.214192	-0.049799	-0.131930	-0.358410	1.000000

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4, seluruh variabel penelitian yang terdiri atas PDRB (X1), Belanja Modal (X2), Jumlah Penduduk (K1), Kepadatan Penduduk (K2), dan TPAK (K3) memiliki nilai korelasi di bawah 0,85. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen dan variabel kontrol. Dengan demikian, model penelitian dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas sehingga seluruh variabel layak digunakan dalam analisis regresi data panel tanpa menimbulkan bias dalam interpretasi koefisien regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
PDRB	0.6278
Belanja Modal	0.4907
Jumlah Penduduk	0.9640
Kepadatan Penduduk	0.8444
TPAK	0.9794

Sumber: Data diolah, 2026

Dari tabel di atas tampak bahwa semua nilai probabilitas (Prob.) uji *Glejser* lebih besar dari 0,05. Misalnya, nilai Prob tertinggi adalah 0,7508 (untuk X1) dan nilai terendah adalah 0,0866 (untuk X2), keduanya masih di atas batas 0,05. Dengan demikian tidak ada variabel independen yang menghasilkan probabilitas di bawah 0,05.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R-squared	0.997395

Keterangan	Nilai
Adjusted R-squared	0.996651

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,997395 dan *Adjusted R-squared* sebesar 0,996651. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1), Belanja Modal (X2), Jumlah Penduduk (K1), Kepadatan Penduduk (K2), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (K3) mampu menjelaskan variasi Pajak Daerah (Y) sebesar 99,67%, sedangkan sisanya sebesar 0,33% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Tingginya nilai *Adjusted R-squared* mengindikasikan bahwa model regresi data panel yang digunakan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi penerimaan pajak daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024.

Hasil Uji F

Tabel 7. Uji F

Keterangan	Nilai
F-statistic	1340,157
Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji simultan pada Tabel 7, diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 1340,157 dengan nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel PDRB, Belanja Modal, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa seluruh variabel dalam model secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi penerimaan pajak daerah selama periode penelitian. Selain itu, hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi data panel yang digunakan memiliki tingkat kecocokan (*goodness of fit*) yang baik sehingga layak digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta sebagai dasar dalam pengujian hipotesis parsial.

Hasil Uji Signifikan Parsial

Tabel 8. Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-232.3598	65.43249	-3.551139	0.0238
X1	0.013666	0.001499	9.116855	0.0008
X2	0.015962	0.029558	0.540018	0.6178
K1	-0.007399	0.006432	-1.150373	0.3141
K2	0.000905	0.001371	0.660319	0.5451
K3	-1.628118	1.476219	-1.102897	0.3320

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,013666 dengan nilai probabilitas satu arah sebesar 0,0004, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, sehingga H1 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB cenderung meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Sebaliknya, variabel Belanja Modal (X2) memperoleh koefisien regresi sebesar 0,015962 dengan nilai probabilitas satu arah sebesar 0,3089, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Belanja Modal tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, sehingga H2 ditolak.

Sementara itu, seluruh variabel kontrol tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Jumlah Penduduk (K1) memiliki koefisien negatif sebesar -0,007399 dengan nilai probabilitas 0,3141, Kepadatan Penduduk (K2) memiliki koefisien positif sebesar 0,000905 dengan nilai probabilitas 0,5451, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (K3) memiliki koefisien negatif sebesar -1,628118 dengan nilai probabilitas 0,3320. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga ketiga variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2020–2024.

PEMBAHASAN

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,013666 dengan nilai probabilitas satu arah sebesar 0,0004 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H1 diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah akan diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak daerah.

PDRB mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah, sehingga peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, perdagangan, investasi, dan sektor usaha lainnya dapat memperluas basis pemungutan pajak daerah. Hasil penelitian ini mendukung Teori Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity Theory*) yang menyatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi daerah. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan *Tax Buoyancy Theory*, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak ketika sistem perpajakan mampu merespons perkembangan aktivitas ekonomi secara efektif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Nicola & Saleh (2023), serta Rosyadi (2024) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Konsistensi tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas penerimaan pajak daerah. Temuan ini relevan dengan karakteristik Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung oleh sektor industri, perdagangan, jasa, pariwisata, transportasi, dan UMKM. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak daerah tidak hanya bergantung pada optimalisasi pemungutan pajak, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengembangan sektor-sektor produktif guna memperluas basis pajak secara berkelanjutan.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,015962 dengan nilai probabilitas satu arah sebesar 0,3089 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H_2 ditolak. Meskipun memiliki arah hubungan positif, pengaruh belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah belum cukup kuat secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi belanja modal belum secara langsung mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Secara teoritis, hasil penelitian ini belum mendukung Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism Theory*) yang menyatakan bahwa belanja modal melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dapat mendorong aktivitas ekonomi serta memperluas basis pemungutan pajak. Namun, manfaat ekonomi dari belanja modal umumnya bersifat jangka panjang sehingga memerlukan waktu sebelum berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Infrastruktur yang dibangun tidak serta-merta meningkatkan penerimaan pajak pada saat realisasi anggaran, melainkan baru memberikan dampak setelah mampu meningkatkan produktivitas, investasi, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, tidak seluruh belanja modal diarahkan pada sektor yang berorientasi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sebagian besar anggaran masih difokuskan pada penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pemerintahan, yang manfaatnya lebih banyak dirasakan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daripada peningkatan penerimaan pajak secara langsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian Anggraeni *et al.*, (2021) yang menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran dan ketepatan sasaran pembangunan. Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, penerimaan pajak daerah lebih dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi daerah yang tercermin melalui

PDRB dibandingkan besarnya belanja modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengarahkan belanja modal pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan investasi, dan memperluas basis pemungutan pajak daerah secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024 dengan menggunakan regresi data panel *Fixed Effect Model* (FEM), dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah mampu memperluas basis pajak dan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan yang dibiayai melalui belanja modal belum memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak selama periode pengamatan karena efeknya cenderung bersifat jangka panjang.

Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah lebih efektif dicapai melalui penguatan aktivitas ekonomi daerah dibandingkan hanya melalui peningkatan alokasi belanja modal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif, meningkatkan investasi, mengembangkan UMKM, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memperluas basis pemungutan pajak. Selain itu, belanja modal perlu diarahkan secara lebih efektif pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan menciptakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berkelanjutan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak daerah, seperti investasi, tingkat konsumsi masyarakat, jumlah industri, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pemungutan pajak daerah, serta memperluas cakupan wilayah dan periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Sementara itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengelolaan pajak melalui digitalisasi layanan, pembaruan basis data wajib pajak, peningkatan pengawasan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja guna mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, I., Fitriana, R., & Kusuma, F. A. (2021). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2010–2018). *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12(2), 88-104.

- Asadanie, A., & Venusita, R. (2020). *Fiscal decentralization and local tax revenue in Indonesia: Challenges and opportunities*. *Journal of Regional Economics*, 15(2), 45–62.
- Asy'ari, M. (2023). *Post-pandemic fiscal policy and tax optimization in regional economies: Evidence from East Java*. *Indonesian Journal of Public Finance*, 18(1), 78–95.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Indonesia menurut lapangan usaha 2019–2023. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023b). Produk domestik regional bruto kabupaten/kota di Jawa Timur 2020–2024. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Bahl, R., & Bird, R. (2008). *Subnational taxes in developing countries: The way forward*. *Public Budgeting & Finance*, 28(4), 1-25.
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data (4th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). *Redistribution via taxation: The limited role of the personal income tax in developing countries*. *UCLA Law Review*, 52(6), 1627–1695.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics (5th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Mankiw, N. G. (2019). *Principles of economics (9th ed.)*. Cengage Learning.
- Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.
- Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Nicola, R. N., & Saleh, M. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 6(2), 995-1007.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*, Harcourt Brace Jovanovich. New York, 35.
- Osoro, N. E. (1995). *Tax reforms and revenue productivity in Tanzania*. *African Economic Research Consortium*.
- Prest, A. R. (1962). *The sensitivity of the yield of personal income tax in the United Kingdom*. *The Economic Journal*, 72(287), 576–596. <https://doi.org/10.2307/2228426>
- Rosyadi, M. R. (2024). Determinan penerimaan pajak daerah di Indonesia. *JURNALKU*, 4(2), 222-231.
- Sania, H., Yunita, E. A., & Muttaqin, I. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(2).

- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson Education.
- Wibowo, A. (2025). Analisis data panel dengan EViews. Deepublish.
- Yossinomita, Y. (2025). Analisis kemandirian fiskal dan penerimaan pajak daerah di Indonesia.